

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ODA DAN PERKEMBANGAN ODA DI INDONESIA

Bab ini secara khusus akan membahas mengenai *Official Development Assistance* (ODA) yang pemaparannya akan penulis bagi dalam dua bagian yaitu sejarah ODA Jepang dan perkembangan ODA di Indonesia. Pada bagian pertama pembahasan akan dimulai dari sejarah Jepang sebagai negara penerima ODA hingga menjadi negara *top donor* dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang institusi yang bertanggungjawab atas penyaluran ODA yaitu JICA. Kemudian pada bagian kedua pembahasan akan difokuskan pada perkembangan ODA di Indonesia dimulai dari masa ODA sebagai *war reparation*, ODA pada masa krisis Asia pada tahun 1997 dan ODA pasca krisis.

A. Sejarah ODA Jepang

Sebelum menjadi negara yang memberikan ODA ke negara lain, Jepang memiliki sejarah sebagai negara penerima bantuan. Dalam pembahasan ini penulis akan membagi sejarah ODA Jepang dalam dua periode yaitu ketika Jepang menjadi negara penerima dan Jepang sebagai *top donor*.

1. Jepang sebagai Negara Penerima ODA

Periode 1946 – 1951 merupakan tahun dimana Jepang menjadi negara penerima aliran ODA dari Amerika Serikat. ODA pada saat itu diberikan guna memperbaiki kondisi ekonomi dan infrastruktur Jepang yang porak poranda pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II. Program *Government and Relief in Occupied Areas* (GARIOA) dan *Economic Rehabilitation in Occupied Areas*

(EROA) merupakan bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat pada saat itu. Bantuan dana dari program GARIOA sebagian besar dimanfaatkan untuk membeli bahan makanan, bahan bakar, pupuk dan obat-obatan dengan tujuan untuk mencegah kelaparan, penyakit dan gejolak sosial. Sedangkan program EROA dimanfaatkan untuk menyediakan bahan mentah untuk kebutuhan industri dan mesin yang diperlukan untuk merehabilitasi keadaan ekonomi (Takagi, 1995, p. 10). Berikut ini merupakan rincian bantuan yang diterima oleh Jepang pada tahun 1946-1951 :

Gambar 2.1.
Bantuan Amerika Serikat ke Jepang melalui (GARIO-EROA) tahun 1946-1951

U.S. ASSISTANCE TO JAPAN UNDER GARIOA AND EROA, 1946-1951
(in millions of U.S. dollars)

U.S. Fiscal Year	GARIOA	EROA	Administration	Total
1946	92.6	—	—	92.6
1947	287.3	—	12.7	300.0
1948	351.4	—	19.9	371.3
1949	426.2	97.5	25.5	549.2
1950	237.4	188.0	19.2	444.6
1951	182.6	—	15.0	197.6
Total	1,577.5	285.5	92.3	1,955.3

Sumber : Shinji Takagi (1995), hal 7.

Selain menerima bantuan dari Amerika Serikat, pada periode ini Jepang juga menerima bantuan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia untuk membangun infrastrukturnya setelah program GARIOA dan EROA berakhir. Pada periode 1953 sampai 1966 Jepang menerima dana sebesar USD860 juta dari Bank Dunia untuk proyek-proyek besar, khususnya infrastruktur (Inoguchi &

Jain, 2000, p. 153). Dana tersebut setidaknya digunakan untuk mendanai 34 proyek pembangunan di Jepang. Proyek pertama yang didanai oleh Bank Dunia adalah Pembangunan Bendungan Tanagawa, dilanjutkan dengan *Tomei Highway* (menghubungkan Tokyo dengan Nagoya) serta Bendungan *Hydroelectric* Kurobe (salah satu bendungan terbesar di Jepang). Selama tahun 1960-an, Jepang merupakan negara peminjam terbesar kedua di Bank Dunia dan pada tahun 1990 Jepang mampu melunasi pinjaman tersebut (Fukuoka, Oishi, & Kato, 2010).

Namun ketika Jepang masih berstatus sebagai negara penerima ODA, pada tahun 1951 Jepang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran reparasi perang terhadap negara-negara di Asia yang terkena dampak dari Perang Dunia II. Penyaluran reparasi perang yang pertama diberikan kepada Burma, pembayaran ini dilakukan di tahun yang sama ketika Jepang bergabung dalam *Colombo Plan* pada tahun 1954. *Colombo Plan* merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1950 untuk membantu negara-negara Asia di bidang pembangunan sosial ekonomi. Karena itulah Jepang juga menyetujui untuk memberikan bantuan ekonomi kepada beberapa negara di Asia seperti Filipina, Laos, Vietnam, Korea, Malaysia dan Indonesia. Pembayaran reparasi perang ini berlangsung setidaknya hingga tahun 1976. Adanya pembayaran reparasi perang pada awalnya merupakan alasan bagi Jepang untuk menyalurkan bantuan luar negerinya dalam rangka memperbaiki citra buruk yang ditorehkan selama terjadinya Perang Dunia II.

2. Jepang sebagai *Top Donor ODA*

Pada tahun 1960-an, Jepang mencatatkan surplus ekonomi pertamanya, hal ini kemudian mendorong Jepang untuk mempromosikan kebijakan pembangunan regional yang dipusatkan di Asia Tenggara. Sehingga ODA pada saat itu diarahkan sebagai sarana ekspansi perdagangan luar negeri Jepang. Hal ini dibuktikan dengan adanya *tied loan* yang mensyaratkan seluruh pengadaan barang dan kontraktor harus berasal dari Jepang. Periode ini sangat penting bagi Jepang. Karena Jepang berkeinginan untuk memperluas cakupan geografis dan sektoral program bantuan ekonominya. ODA Jepang banyak diminati oleh negara-negara berkembang terutama untuk membangun infrastruktur, India merupakan negara yang pertama memanfaatkan pinjaman ini. Periode 1964 hingga 1990 dapat dikatakan sebagai tahun dimana Jepang meningkatkan kuantitas bantuannya. Peningkatan bantuan ini dapat dilakukan karena dalam kurun waktu tersebut Jepang telah berhasil menyelesaikan pembayaran *war reparation* dan adanya apresiasi nilai Yen Jepang terhadap Dollar AS. Berakhirnya pembayaran reparasi perang membuat Jepang dapat memfokuskan alokasi dananya untuk ODA. Karena di masa awal distribusi, pemberian ODA Jepang ditujukan untuk memudahkan akses terhadap sumber daya alam di negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya karena tren positif yang dialami oleh Jepang, pada periode ini diterapkanlah *aid doubling plan*. Kebijakan ini membuat ODA Jepang di Asia Tenggara naik dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara resmi *aid doubling plan* diterapkan pada tahun 1978, dimana pada tahun tersebut ODA

mencapai USD1,4 milyar menjadi USD3,3 milyar di tahun 1980. Kemudian kebijakan ini dilanjutkan pada tahun 1981 menjadi USD18,07 milyar sampai dengan tahun 1985. *Aid doubling plan* ketiga diumumkan pada tahun 1985 dengan perkiraan alokasi sebesar USD40 milyar selama tujuh tahun (Sudo, 2002, p. 59). Dengan adanya kebijakan untuk melipatgandakan ODA secara berulang-ulang, Jepang akhirnya mampu mengalahkan Amerika Serikat sebagai donor terbesar di dunia pada tahun 1989 dan menyematkan julukan *Japan as a top donor*. Keberhasilan Jepang sebagai top donor terus berlanjut hingga tahun 2002.

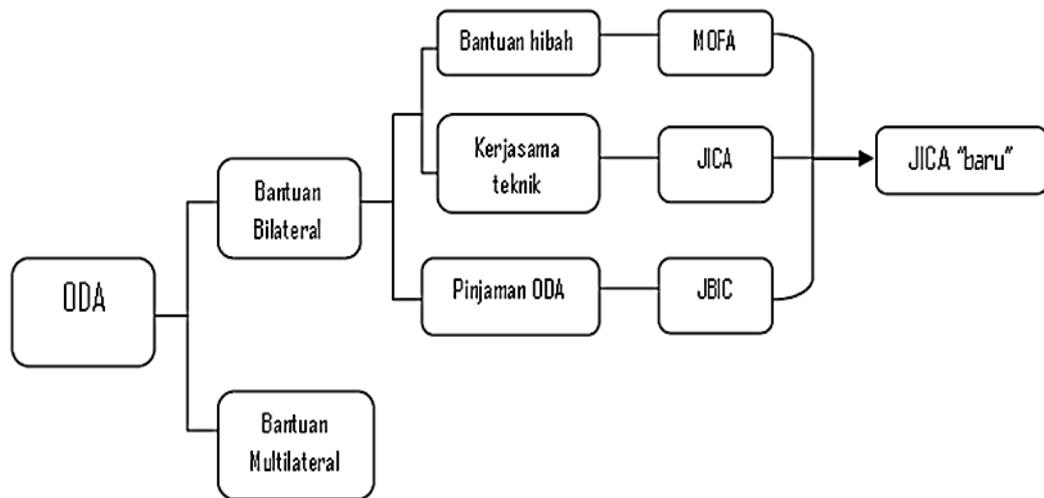
3. JICA sebagai Institusi Penyalur ODA

Pada tahun 1961, *Overseas Technical Cooperation Agency* (OTCA) dibentuk untuk membantu pemerintah Jepang dalam mengimplementasikan kerjasama di negara-negara berkembang. Kemudian, OCTA bergabung dengan *Japan Emigrations Services* (JEMIS) yang bertugas untuk mengurus emigrasi warga Jepang di luar negeri, penggabungan dua lembaga ini membentuk *Japan International Cooperation Agency* yang bekerja sepenuhnya di bawah *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA) pada tahun 1974 (JICA, 2008).

JICA (*Japan International Cooperation Agency*) merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang berdasarkan kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. Pada awal berdirinya JICA pada tahun 1974, ia hanya memiliki fungsi sebagai lembaga kerjasama yang secara khusus bertugas untuk menyalurkan bantuan teknik saja. Namun, pasca krisis Asia, penulis menemukan ada dua reformasi yang dilakukan berkaitan dengan institusi penyalur bantuan ODA ini. Pertama, pada tahun 1999,

OECD (sebagai badan penyalur ODA tipe pinjaman) digabungkan dengan *Export-Import Bank* (yang memberikan pinjaman kepada sektor swasta, baik di Jepang, maupun di negara-negara berkembang, seperti Indonesia), menjadi JBIC (Japan Bank for International Cooperation). JBIC sendiri kemudian memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penyalur ODA pinjaman ke negara-negara berkembang dan juga sebagai penyalur pinjaman ke sektor-sektor swasta (sebagai turunan fungsi *Export-Import Bank*). Kedua, pada tahun 2008, *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) yang terkait dengan penyaluran ODA pinjaman ke negara-negara berkembang bergabung dengan JICA, sebagai bentuk upaya Jepang untuk memfokuskan penyaluran ODA hanya pada satu institusi saja. Hasil peleburan dua institusi ini kemudian disebut sebagai JICA baru. Hal ini merupakan upaya Jepang untuk mengupayakan penyaluran ODA yang lebih efisien.

Gambar 2.2. Bagan Pembentukan JICA Baru



Sumber : Buletin JICA di Indonesia, 2008, p.7.

Sehingga seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas, saat ini JICA memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas tiga Bantuan Pembangunan Resmi atau Official Development Assistance (ODA) yaitu :

a. ***Pinjaman Yen*** memiliki arti meminjamkan uang modal yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Namun pinjaman ini sedikit berbeda dengan pinjaman lainnya. Karena persyaratan pinjaman ini cukup ringan. Yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah.

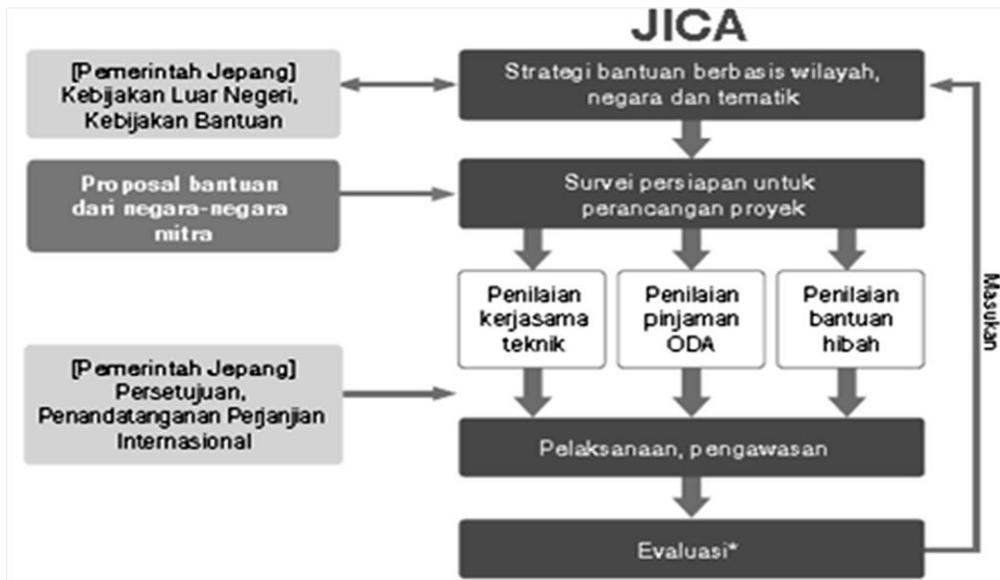
b. ***Bantuan dana hibah*** adalah bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali

c. ***Kerjasama Teknis*** merupakan kerjasama dibidang pengembangan SDM. Keberadaan kerjasama teknik bertujuan untuk meningkatkan taraf pembangunan manusia. Atau memungkinkan terjadinya transfer kemampuan yang dimiliki oleh teknisi Jepang agar dapat tersalurkan pada sumber daya manusia di negara berkembang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada negara berkembang.

JICA sendiri dalam menyalurkan bantuannya memiliki *project cycle* yang terdiri atas tahap awal (pengajuan dan formulasi), tahap implementasi dan tahap evaluasi.

Gambar 2.3.

Alur Operasional JICA dalam Penyaluran Bantuan



Sumber: <https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/pdf/brochure01.pdf>

Bagian yang unik dapat kita lihat pada gambar 2.3. adalah bahwa ODA Jepang haruslah melalui pengajuan (request) dari negara penerima terlebih dahulu, prinsip ini dinamakan *yoseishugi*. Jepang menganggap prinsip ini sangat penting karena bertujuan untuk membangun nilai *self-help* yang merupakan kunci keberhasilan Jepang bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Perang Dunia II (Sudo, 2002, p. 64).

Pada dasarnya, siklus yang ada pada ODA jenis hibah dan pinjaman adalah sama, dimana sebuah permintaan (request) akan diproses dan dikirim ke Tokyo, hal ini biasanya dilakukan oleh personil MoFA yang terdapat di kantor-kantor perwakilan Jepang. Untuk memahami siklus proyek dari ODA Jepang seperti yang digambarkan secara singkat pada bagan di atas, penulis akan

memaparkan tahapan-tahapannya secara lebih detail melalui pemaparan di bawah ini:

a) Tahap awal (pengajuan dan formulasi)

Pada tahap awal, pengajuan akan diseleksi untuk menentukan proyek yang harus diprioritaskan untuk diimplementasikan. Untuk menguji kelayakan proyek pemerintah Jepang akan mengirim ahli-ahli untuk melakukan studi lapangan di negara yang mengajukan bantuan tersebut. Setelah studi berhasil dilakukan maka hasil studi akan kembali didiskusikan oleh pemerintah Jepang mengenai bentuk ODA yang akan disalurkan, dengan pemerintah negara penerima. Keputusan akhir ini kemudian menjadi *blueprint* dari ODA yang akan diimplementasikan.

b) Tahap *Approval*

Setelah rancangan ODA disetujui, maka akan langsung dimasukkan ke JICA sebagai bentuk pengajuan untuk meminta bantuan JICA dalam mengimplementasikan rancangan yang telah disepakati. Kementerian yang terkait, kemudian turut serta untuk membahas cara pengimplementasian ODA. Setelah disepakati mengenai cara pengimplementasiannya, maka rancangan dari ODA yang ada kemudian akan mendapatkan persetujuan dari kabinet, sebagai bentuk formalitas bahwa pengajuan ODA telah diterima dan disetujui oleh pemerintah Jepang.

c) Tahap Implementasi

Tahap ini diawali dengan adanya kesepakatan bilateral antara Jepang dengan negara yang akan menerima ODA. Kemudian disusul oleh pembahasan mengenai masalah-masalah teknis dalam pengimplementasiannya, seperti kontrak

untuk konsultan, kontrak untuk pembiayaan (bank) serta kontrak yang dengan masalah konstruksi. Kemudian tahap ini diakhiri dengan pembangunan proyek ODA yang diajukan.

d) Tahap Operasi dan Evaluasi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus proyek dimana pemerintah Jepang akan melihat apakah proyek ODA yang telah diimplementasikan berjalan dengan semestinya serta melakukan evaluasi mengenai dampak pelaksanaan proyek yang ada.

Pengawasan dan Evaluasi yang dilakukan oleh JICA sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah ODA yang diberikan tepat sasaran dan membawa dampak positif di negara penerima. Adanya evaluasi yang dilakukan setiap 1-3 tahun setelah proyek selesai dikerjakan dapat membantu JICA untuk mempertimbangkan kekurangan apa saja yang harus diperbaiki dan adanya *input* dari negara penerima dapat mendorong perbaikan dalam mekanisme distribusi bantuan sehingga kedepannya bantuan dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien.

B. Perkembangan ODA di Indonesia

Untuk memahami perkembangan ODA di Indonesia, penulis akan memaparkan secara umum distribusi ODA Jepang baik dalam bentuk bantuan hibah, kerjasama teknik dan pinjaman yen di Indonesia. Pemahaman tentang distribusi ODA di Indonesia akan dipermudah dengan, membagi pemaparan ke

dalam tiga periode waktu yaitu distribusi ODA di masa awal (1969-1996), ODA saat krisis Asia (1997-1999) dan ODA pasca krisis Asia (2000-2008).

1. Masa Awal Distribusi ODA

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ODA pertama kali masuk di Asia pasca Perang Dunia II. Bantuan masuk dalam bentuk pembayaran reparasi perang yang dimulai pada tahun 1954. Terdapat beberapa negara di Asia yang mendapat bantuan reparasi perang salah satunya Indonesia. Pembayaran reparasi perang pada Indonesia dimulai pada tahun 1958. Berikut ini adalah rincian nominal bantuan reparasi perang yang diterima oleh Indonesia dan beberapa negara di Asia :

Gambar 2.4.
Pembayaran Ganti Rugi Jepang
JAPAN'S REPARATIONS AND QUASI-REPARATIONS PAYMENTS
(in millions of U.S. dollars and billions of yen)

Recipient	Amount		Payment Period	
	U.S. Dollars	Yen	From	To
Reparations				
Burma	200.0	72.0	Apr 1955	Apr 1965
Philippines	550.0	190.2 ^a	Jul 1956	Jul 1976
Indonesia	223.0	80.3	Apr 1958	Apr 1970
South Vietnam	39.0	14.0	Jan 1960	Jan 1965
Total	1,012.0	356.6		
Quasi reparations^b				
Thailand				
Original	15.0	5.4	Jul 1955	May 1959
Revised	26.7	9.6	May 1962	May 1969
Laos	3.0	1.0	Jan 1959	Jan 1965
Cambodia	4.5	1.5	Jul 1959	Jul 1966
Burma	140.0	47.3 ^c	Apr 1965	Apr 1977
Korea	300.0	102.1	Dec 1965	Dec 1975
Singapore	—	2.9	Sep 1967	Mar 1972
Malaysia	—	2.9	Sep 1967	May 1972
Micronesia	—	1.8	May 1972	Oct 1976
Mongolia	—	5.0	Aug 1977	Aug 1981
Total		179.6		

Sumber : Shinji Takagi (1995), hal.11

Berdasarkan data di atas, dalam perjanjian damai Jepang- Indonesia disepakati bahwa Jepang akan membayar ganti rugi senilai USD223,080 juta. Dan berdasarkan data dari *theglobalreview.com*, diketahui bahwa Jepang membatalkan tagihannya terhadap Indonesia sebesar USD176,914 juta. Pembayaran reparasi perang yang pertama dimulai pada tahun 1958 dan lunas dalam jangka waktu dua belas tahun dengan cicilan US\$20 juta setiap tahun. Pembayaran ganti rugi dapat dilakukan dalam bentuk barang atau jasa, dimana kedua belah pihak dapat menyusun daftar barang atau jasa yang akan diserahkan Jepang. Perjanjian damai dan reparasi perang tersebut disahkan oleh DPR RI tanggal 13 Maret 1958 (Isnaeni, 2010).

Menjelang masa berakhirnya pembayaran reparasi perang, Indonesia mengalami pergantian rezim dari orde lama ke orde baru. Pergantian rezim ini membawa perubahan pada pemanfaatan ODA, dimana pada rezim Orde Baru pemerintahan yang berjalan harus memikirkan cara memanfaatkan ODA untuk mendukung pembangunan negara karena rezim orde lama belum mampu membawa Indonesia pada kemajuan pembangunan baik dari segi infrastruktur ekonomi maupun sosial. Sehingga masa awal distribusi ODA akan penulis anggap berlangsung dari tahun 1969-1996 dimana ODA dikaitkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Adanya rencana pembangunan ini memudahkan penulis untuk melihat bagaimana prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia pada saat itu dan kaitannya dengan ODA (INFID, 2005). Berikut ini merupakan rincian ODA Jepang yang disalurkan ke Indonesia selama periode tersebut:

Tabel 2.1.

Rincian Pinjaman ODA dalam Pembangunan Lima Tahun Indonesia (dalam Milyar Dollar AS)

PELITA/tahun	Jumlah Pinjaman
PELITA I 1969-1974	848,3
PELITA II 1974-1979	882,1
PELITA III 1979-1984	1.467,3
PELITA IV 1984-1989	3.104,9
PELITA V 1989-1994	6.850,0
PELITA VI 1994-1999	9.095,8

Tabel 2.1. memaparkan fakta bahwa pada masa orde baru ODA yang diberikan oleh Jepang terus meningkat. Bahkan kita dapat melihat peningkatan bantuan hingga 50% pada tahun 1980 - 1990an. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan *aid doubling plan* yang diberlakukan oleh Jepang pada tahun 1978.

Bantuan ODA yang disalurkan pada masa awal dimanfaatkan untuk mendanai berbagai macam proyek mulai dari proyek yang berkaitan dengan pembangunan jalan raya, bendungan, bandara dan rel kereta api. Misalnya pada tahun 1974 dalam PELITA II, tercatat ODA dimanfaatkan untuk mendanai 34 proyek, dengan alokasi dana terbesar pada proyek PLTA di Surabaya yaitu dengan kucuran dana 63,41 juta yen dan proyek Perluasan Jaringan Televisi dan Radio sebesar 46,7 juta yen. Selain pinjaman yen, pada masa distribusi awal ODA, Jepang juga memberlakukan kerjasama teknik dimana sampai dengan tahun 1990 Jepang telah menerima sekitar 8.957 peserta pelatihan, pengiriman 3.758 orang tenaga ahli dalam 76 proyek dengan nilai biaya sebesar 1.162,67 juta yen.

Kemudian sebagai syarat dari adanya pinjaman yen, Jepang memiliki

kewajiban untuk mengalokasikan hibah untuk Indonesia. Hibah yang disalurkan pada masa ini banyak dimanfaatkan untuk program-program yang berkaitan dengan pendidikan, sanitasi, dan kesehatan. Misalnya pada tahun 1983, yaitu dengan pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Instruktur Keterampilan Kerja dan Petugas Sosialisasi Industri Skala Kecil. Bantuan hibah ini terbagi menjadi dua tahap yaitu, pertama (1983-1990) bantuan hibah diberikan dalam bentuk bangunan dan mesin-mesin, dibuka dua jurusan, jurusan mesin, mobil, las, plat baja, elektronik, listrik, dan jurusan teknik pelatihan selama 2 tahun (Diploma 2). Dan tahap kedua (1992 - 1997) merupakan realisasi pendidikan dan pelatihan bagi instruktur selama 3 tahun (Diploma 3) kemudian pelatihan peningkatan keterampilan bagi teknisi perusahaan swasta untuk jurusan mesin, listrik dan elektronik (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2017). Kehadiran pusat pendidikan ini kemudian di masa depan berkembang menjadi Badan Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (B2PLKLN) yang berfungsi untuk memberikan pelatihan bagi pengangguran dan pelatihan atas permintaan perusahaan setempat, terkadang juga dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan sebelum tenaga kerja diberangkatkan ke luar negeri.

ODA di Indonesia pada perkembangannya mencapai puncak pada PELITA IV dimana pada saat itu Indonesia tengah diterpa krisis regional. Bahasan mengenai krisis ini akan dilanjutkan secara menyeluruh dalam poin selanjutnya mengenai ODA saat krisis asia.

2. Masa Krisis Asia 1997

Krisis finansial menerpa perekonomian beberapa negara di Asia pada tahun 1997. Krisis ini ditandai dengan melemahnya mata uang Thailand (Baht) atas Dollar AS dan menimbulkan efek domino ke negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia. Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampak krisis. Hal ini dibuktikan dengan nilai tukar rupiah yang menurun drastis terhadap dollar AS.

Jepang sendiri sebagai negara yang berada di Asia tidak terkena dampak langsung dari krisis finansial ini. Namun, Jepang memberikan perhatian terhadap negara-negara yang menjadi korban dari krisis finansial pada tahun 1997. Alasan Jepang untuk membantu negara-negara korban krisis adalah karena negara yang menjadi korban adalah mitra Jepang dalam kerjasama ekonomi dan pasar bagi komoditas Jepang. Pemberian bantuan dianggap sangat penting oleh Jepang terutama bagi negara yang terpapar krisis, karena jika dibiarkan begitu saja daya beli masyarakat yang lemah karena krisis dapat mengancam komoditas Jepang.

Indonesia, sebagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Jepang mendapatkan bantuan selama krisis Asia berlangsung. Berikut ini adalah nilai bantuan yang mengalir di Indonesia pada tahun 1997-1999 (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2008):

Tabel 2.2.

**ODA Jepang di Indonesia Saat Krisis Asia Berdasarkan Jenisnya
(dalam Juta Dollar AS)**

Tahun	Pinjaman Yen	Hibah	Kerjasama Teknik
1997	739,61	66,57	148,39
1998	1.034,51	114,60	123,99
1999	1.994,04	100,54	130,80

Sumber : http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm

Berdasarkan tabel 2.2, dapat kita lihat bahwa pinjaman yen merupakan bantuan yang nilainya paling menonjol dan terus meningkat jika dibandingkan dengan jenis ODA kerjasama teknik maupun hibah. Hal ini membuktikan bahwa bagi Jepang, pinjaman yen merupakan jenis bantuan yang dinilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat krisis berlangsung. Dengan hadirnya bantuan ini diharapkan Indonesia mampu menyeimbangkan neraca anggarannya. Bantuan pinjaman ODA Jepang pada periode ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendanai beberapa proyek seperti (JICA, 1999):

Tabel 2.3.
Proyek ODA di Indonesia di Saat Krisis Asia

Nama Projek	Sektor	Tahun	Nilai Pinjaman (juta yen)
Sumatera East Coast Highways Project	Jalan	1998	6,652
Railway Double Tracking of Cikampek-Cirebon Project	Transportasi	1998	8,748
Medan Flood Control Project	Irigasi dan Penanggulangan Banjir	1998	9,697
Health and Nutrition Sector Development Program	Pinjaman Komoditas	1999	35,280
Sector Program Loan	Pinjaman Komoditas	1999	100,000

Sumber : https://www2.jica.go.jp/en/yen_loan/index.php/module/

Selain bantuan ODA, selama krisis Asia berlangsung Indonesia juga mendapatkan bantuan dari *Miyazawa Plan* yang digagas oleh Jepang. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak krisis Asia. Dana yang digelontorkan *Miyazawa Plan* sekitar USD30 Milyar. Indonesia mendapat sekitar USD2,4 Milyar yang digunakan dalam pendanaan dua program dalam tabel 2.3 yaitu *Health and Nutrition Sector Development Program* dan *Sector Program Loan*. Kehadiran ODA pada masa krisis melanda Indonesia turut memberi pembuktian bahwa Jepang begitu menganggap Indonesia sebagai mitra kerjasama yang penting.

3. ODA Pasca Krisis Asia

ODA Jepang di Indonesia pasca krisis Asia lebih bersifat fluktuatif jika dibandingkan dengan ODA pada dua masa sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena bangkitnya ekonomi Tiongkok sehingga fokus Jepang dalam menyalurkan bantuan tidak terpusat hanya pada Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja. Fakta ini didukung oleh data distribusi ODA Jepang berikut ini (Hadil, 2009, p. 221):

Tabel 2.4.

Distribusi ODA secara Regional

(dalam Juta Dollar AS)

Wilayah	1985	1990	1995	1998	2000	2002	2004
Asia	1732	4117	5745	5372	5284	4085	2544
ASEAN	800 (46%)	2299 (56%)	2229 (39%)	2356 (44%)	3129 (58%)	1748 (43%)	897 (35%)
Timur Tengah	201	705	721	392	727	209	1031
Afrika	252	792	1333	950	969	585	647
Amerika Latin	225	561	1142	553	800	592	309
Oceania	24	114	160	147	151	94	42
Eropa	1	158	153	144	118	121	141
Total	2257	6941	10557	8606	9640	6726	5954

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat adanya penurunan alokasi ODA untuk kawasan ASEAN, terutama mulai dari tahun 2002 dimana ASEAN mendapat sekitar 43% alokasi ODA. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun

2004, ASEAN hanya mendapat 35% dari ODA Jepang. Tetapi penurunan alokasi ODA di kawasan Asia Tenggara tidak berarti Jepang tidak menganggap kawasan ini sebagai prioritas. Karena di kawasan Asia Tenggara sendiri Indonesia tetap menjadi negara yang memperoleh jumlah ODA yang signifikan. Terutama dengan terjadinya tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004. Sehingga aliran ODA untuk Indonesia pada tahun berikutnya mengalami peningkatan. Berikut ini adalah rincian ODA di Indonesia pada tahun 2000-2008 (MOFA, 2008):

Tabel 2.5.

ODA Jepang di Indonesia tahun 2000-2008

(dalam Juta Dollar AS)

Tahun	Pinjaman Yen	Kerjasama Teknik	Hibah	Total
2000	945,66	144,60	52,07	1,142,33
2001	702,83	117,27	45,16	865,26
2002	441,59	126,46	63,54	631,59
2003	946,77	120,66	82,36	1,149,79
2004	452,52	105,96	25,47	583,95
2005	1,072,18	98,40	172,21	1,342,79
2006	882,83	91,11	60,67	1,034,61
2007	1,060,03	81,68	48,52	1,190,23
2008	1,205,99	74,21	37,06	1,317,26

Sumber : http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page_000029.html#section9

Peningkatan ODA pada tahun 2005 diakibatkan oleh terjadinya tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004. Pada saat itu Jepang menjadi salah satu negara yang tanggap dalam memberikan bantuan, pernyataan ini dibuktikan dengan adanya bantuan hibah non-proyek yang terdiri atas 17 proyek meliputi pemberian obat-

obatan, rekonstruksi 5 puskesmas dan pemberian peralatan/fasilitas medis, rekonstruksi 6 panti asuhan yatim piatu, rekonstruksi 12 gedung sekolah dan pemberian alat ajar-mengajar, rekonstruksi pusat pelatihan tenaga kerja, rekonstruksi 2 gedung universitas, dan terakhir yaitu perbaikan jalan di pesisir barat pulau Sumatera, dll. Secara kumulatif dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sampai dengan tahun 2006 berjumlah 29,5 milyar Dollar AS. Dengan rincian pinjaman yen sebesar 125,5 milyar Yen, kerjasama teknik sebesar 7,8 milyar Yen dan bantuan hibah sebesar 5,4 milyar Yen.

Kemudian, peningkatan nilai ODA di Indonesia pada tahun 2007 dan 2008 dipengaruhi dengan ditanda tangannya surat persetujuan *Economic Partnership Agreement* (EPA) pada 20 Agustus 2007 yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan dari disepakatinya EPA adalah untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara. Adanya peningkatan distribusi ODA Jepang di Indonesia sangat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM yang berkaitan dengan perdagangan dan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan pada bab ini dapat disimpulkan bahwa distribusi ODA di Indonesia sangat dinamis jika dilihat dalam tiga periode distribusi yang ada yaitu masa awal distribusi, ODA pada masa krisis Asia maupun pada masa pasca krisis. Dinamisnya distribusi ODA Jepang di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi internal Indonesia, kebijakan luar negeri Jepang dan kondisi perekonomian Jepang.

Kehadiran ODA Jepang di Indonesia dengan berbagai jenisnya telah menimbulkan pengaruh dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dimana dalam tiga periode perkembangan ODA di Indonesia, ODA sebagian besar dimanfaatkan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu dalam pemaparan di bab selanjutnya penulis akan memaparkan tentang kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia.